BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan memiliki tujuan mendasar untuk menciptakan kesejahteraan dan kekayaan bagi seluruh masyarakat. Semua hasil upaya pembangunan diarahkan agar dapat dinikmati oleh semua warga, dengan fokus pada peningkatan kesehatan fisik dan mental secara adil dan merata. Pada pemilihan presiden tahun 2014, salah satu visi misi Joko Widodo adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan yang meluas ke seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Upaya ini bertujuan agar seluruh penduduk dapat menikmati manfaat pembangunan dan agar terciptanya aksesibilitas di bidang transportasi, industri, dan ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan di seluruh wilayah nusantara. Maka dari itu, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah secara resmi sejak 1 Januari 2001, setiap daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya sendiri. Konsep daerah otonom, yang juga dikenal sebagai daerah, mengacu pada satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Semua ini berdasarkan pada prinsip Prakarsa yang bersumber dari aspirasi masyarakat dalam kerangka Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009).

Menurut Allen (dalam Kuncoro, 2004), Meningkatnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya berhubungan dengan kegagalan dalam perencanaan strategi pertumbuhan yang dibangun yang mampu meratakan perkembangan, tetapi juga dipicu oleh pemahaman bahwa proses pembangunan memiliki kerumitan dan pemulihan yang

membuatnya sulit dikendalikan serta diatur dari tingkat pusat. Oleh karena itu, dengan keyakinan yang kuat, para desentralisasi desentralisasi mengajukan argumen yang berlebihan mengenai urgensi desentralisasi dalam proses perencanaan dan administrasi. Menurut Dirjen PUOD (dalam Kuncoro, 2004) pada dasarnya isi dan luas rumah dibedakan menjadi: (1) rumah tangga secara riil, yaitu rumah tangga dengan system yang didasarkan pada keadaan, factor, tindakan, dan kebijakan nyata, sehingga terdapat harmoni antara kemampuan, tugas, dan kekuatan baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah; (2) rumah tangga materiil, bersumber pada ajaran rumah tangga yang pembagian kewenangannya sudah terperinci antara tugas pemerintah dan tugas daerah; (3) urusan dan sifat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu perbedaan tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan.

Latar belakang Dasar pelaksanaannya reformasi dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bagian pengantar dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten dan kota-kota, semuanya bertujuan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan. Setiap wilayah tersebut memiliki hak dan tanggung jawab untuk secara mandiri mengatur dan mengelola berbagai kebutuhan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan ini, daerah memiliki wewenang untuk membebaskan pungutan kepada penduduknya. Dengan dasar ini, diharapkan pemerintah dapat menggali sumber pendapatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan

proyek pembangunan di wilayah asal melalui pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, konsep pendapatan asli daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang berasal dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah yang juga dikenal sebagai PAD, termasuk hasil pemungutan pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan lainnya.

Salah satu pos pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah sumbangan yang harus diberikan kepada Daerah, diwajibkan pada individu atau badan hukum berdasarkan Undang-Undang, dengan keharusan yang bersifat memaksa dan tanpa mendapat ganti rugi secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak mungkin. Hasil pajak ini kemudian akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan perkembangan wilayah setempat. Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau entitas hukum kepada pemerintah daerah tanpa adanya pengembalian yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Ini serupa dengan pandangan Marihot (2013), yang menyebut pajak daerah sebagai kewajiban pembayaran yang diberlakukan oleh individu tanpa penggantian yang seimbang secara langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang undang yang berlaku.

Salah satu faktor yang menghambat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan yang mencapai proporsi yang tinggi. Kemiskinan merupakan situasi yang dicirikan oleh kekurangan dalam berbagai aspek: kekurangan pendidikan, kesehatan yang

kurang baik, dan kebutuhan transportasi yang tidak terpenuhi bagi warga. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai keadaan di mana anggota masyarakat belum atau tidak dapat berpartisipasi dalam perubahan yang terjadi, karena terbatasnya kemampuan mereka, baik dalam kepemilikan sumber daya produksi maupun kualitas sumber daya produksi yang memadai. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan yang berlangsung (Arsyad, 2010).

Pajak daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten atau kota meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, pajak parkir, pajak sarang burung domet, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak hiburan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Nur'ainun (2020: 94) Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan semua orang membutuhkan dan memiliki kendaraan bermotor. Besaran tarif pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut: 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan angkutan umum; 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah; 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tingginya penerimaan pendapatan asli daerah juga bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor kepada pemilik selanjutnya akibat perjanjian dua belah pihak yang terjadi karena adanya proses jual beli. Objek BBN-KB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda beserta atributnya, yang dioperationalkan di air dengan ukuran isi kotor yang tersedia. Penetapan tarif BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi penyerahan pertama dan 1% (satu persen) pada penyerahan kedua. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajaknya ditetapkan masing-masing tangan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan penyerahan kedua sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen), (Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, besarnya PBBKB yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual sebelum pajaknya. Ini berarti dari setiap liter BBM yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan 5% (lima persen) penerimaan PBBKB. Sementara itu, besaran tarif PBBKB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pengaturan lebih lanjut dilakukan terhadap kendaraan umum dengan tarif paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pemerintah dapat mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan mendistribusikan pajak secara optimal dan tepat sasaran. Setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang seharusnya berimbang dengan penurunan angka kemiskinan. Sedangkan manakala penerimaan pajak dari waktu ke waktu yang nilainya relatif sama, maka hal tersebut mengindikasikan angka kemiskinan sama pula pada periode yang sama. Keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pemerintah melalui pajak akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sehingga nantinya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan serta mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul. Oleh karena itu pemerintah perlu mengetahui forecasting jumlah penerimaan pajak dimasa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan pajak secara tepat sasaran. Forecasting merupakan cara untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi (Subagyo, 2000). Hal ini serupa dengan pendapat Render dan Heizer (2007) yang mendefinisikan peramalan sebagai seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Meskipun nilainya tidak selalu sesuai dengan kenyataan, dengan adanya forecasting ini kita dapat meminimalisasikan resiko dan faktor-faktor ketidakpastian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priandini pada tahun 2017 tentang Peramalan Penerimaan Jumlah Pajak Daerah Sebagai Penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar menggunakan metode Arima Box-Jenkins menyatakan bahwa peramalan penerimaan Pajak di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2017 menggunakan selang kepercayaan 95% diperoleh hasil dengan batas bawah sebesar Rp 2.258.758,- dan batas atas sebesar Rp 11.016.442,- sehingga penelitian tersebut menunjukkan error yang dihasilkan sudah cukup kecil dan baik untuk menghasilkan prediksi jumlah penerimaan pajak. Oleh karena itu, *forecasting* jumlah pajak sangat diperlukan untuk mengetahui perkiraan jumlah pajak dimasa mendatang, sehingga nantinya menjadi rekomendasi pendistribusian pajak sehingga tepat sasaran dan apabila pajak tersebut kurang dari target penyaluran maka dapat dilakukan antisipasi solusi sedini mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Sayangbati pada tahun 2016 menggunakan analisis deskriptif statistik trend menunjukkan bahwa Pajak Daerah Kontribusinya semakin meningkat dan penerimaannya mengalami trend positif dengan slope curam yang menunjukkan penerimaan Pajak Daerah akan meningkat dengan cepat. Retribusi Daerah kontribusinya semakin menurun dan trend penerimaannya juga positif. Hal ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susena pada tahun 2014 dengan hasil dari penelitian ini menggambarkan efektivitas realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB. Sama-sama terjadi pada tahun 2011 sebesar 122,26%, dan 129,42%. Hasil

peramalan PKB pada tahun 2015 sebesar Rp 194.525.355.399 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 230.315.333.298. Hasil peramalan BBN-KB tahun 2015 pendapatan BBN-KB sebesar Rp 192.990.945.600 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 213.961.622.200.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pentingnya ketiga sector permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Trend Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana trend pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana trend pencapaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimana trend pencapaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018-2022?
4. Bagaimana trend pencapaian PAD di kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018-2022?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusalah masalah diatas, maka peneliti memiliki Batasan penelitian:

1. Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di Samsat Kabupaten Komerling Ulu beralamatkan di Jl. May. Ismail Husein No.796, Kemala Raja, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2022

3. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKb) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui trend pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Ogan Komerling Ulu pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui trend pencapaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Ogan Komerling Ulu pada tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui trend pencapaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kabupaten Ogan Komerling Ulu pada tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui trend pencapaian PAD di kabupaten Ogan Komerling Ulu pada tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan literatur mengenai trend pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pembuatan kebijakan pelayanan dan sistem pembayaran dengan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan adanya penelitian analisis trend ini.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 5 bab atau sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan uraian berupa teori, temuan, dan penelitian yang bersumber dari berbagai sumber Pustaka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti menjelaskan secara jelas dan detail terkait lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

Peneliti menjelaskan secara jelas dan detail terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 5 bab atau sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan uraian berupa teori, temuan, dan penelitian yang bersumber dari berbagai sumber Pustaka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti menjelaskan secara jelas dan detail terkait lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

Peneliti menjelaskan secara jelas dan detail terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.